

**OPTIMALISASI KEGIATAN RESES ANGGOTA DPRD
DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT
DI BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Muhammad Faris Rahman

29.1184

Asdaf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Politik Indonesia Terapan

Email: farisrahman24@yahoo.com

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The inability of DPRD members to carry out activities to absorb aspirations effectively for the community results in the non-distribution of community aspirations, the Covid-19 pandemic has a direct impact on recess activities, especially in the absorption of community aspirations so that there is a less than optimal absorption of aspirations and community complaints and the implementation of recess activities will affect the performance of the DPRD institution. **Purpose:** The author conducted a study with the aim of seeing the optimization of recess activities of DPRD members in absorbing community aspirations in the field of finance and development during the COVID-19 pandemic in Tanah Laut Regency. **Method:** The research approach used by the authors in this study is a qualitative descriptive method. Data collection techniques used by interviews, observations, documentation. And the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification using recess theory. **Results/Findings:** Based on the results of the study, it can be seen that the implementation is not optimal because the absorption of aspirations is still not optimal. has not been evenly distributed throughout the regions, the implementation of recess is only carried out in the constituencies of DPRD members so that development is only carried out in constituencies for DPRD members and there is a tendency to develop in other regions. **Conclusion:** recess activities of DPRD members in absorbing community aspirations in the field of finance and development during the COVID-19 pandemic in South Kalimantan Province, Tanah Laut Regency, in its implementation the council secretariat as a companion and facilitating DPRD members to carry out recess activities. At the implementation stage, the community is quite happy with the recess, but on the other hand, the implementation of recess activities is only in the area chosen by the DPRD so that the absorption of aspirations has not been evenly distributed throughout the region. Every recess activity of dprd members are required to make a written report and will be submitted at the plenary meeting, members who receive aspirations often find repeated aspirations every time there is a recess activity. The results of the plenary meeting which were followed up to regional leaders through a working meeting with local governments discussed how to follow up and realize the aspirations of the community

Keywords: Optimization; Recess; DPRD; COVID-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketidakmampuan anggota DPRD untuk melakukan kegiatan menyerap aspirasi secara efektif terhadap masyarakat mengakibatkan tidak tersalurkannya aspirasi masyarakat, Pandemi covid-19 berdampak langsung terhadap kegiatan reses terutama dalam penyerapan aspirasi masyarakat sehingga terjadi kurang optimalnya penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan kegiatan reses ini akan memengaruhi kinerja lembaga DPRD **Tujuan:** penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat optimalisasi kegiatan reses anggota DPRD dalam menyerap

aspirasi masyarakat di bidang keuangan dan pembangunan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan teori reses. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pelaksanaannya belum optimal karena penyerapan aspirasi masih belum maksimal. belum merata di seluruh daerah, pelaksanaan reses hanya dilakukan di daerah pemilihan anggota DPRD sehingga pembangunan hanya dilakukan di daerah pemilihan untuk anggota DPRD dan ada kecenderungan pembangunan di daerah lain. **Kesimpulan:** kegiatan reses anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat di bidang keuangan dan pembangunan di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut, pada pelaksanaannya sekretaris dewan sebagai pendamping dan memfasilitasi anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses. Pada tahap pelaksanaan masyarakat cukup senang dengan adanya reses namun di sisi lain pelaksanaan kegiatan reses hanya di daerah pilihan DPRD sehingga penyerapan aspirasi belum merata ke seluruh wilayah. Setiap kegiatan reses anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis dan akan disampaikan pada rapat paripurna, anggota yang menerima aspirasi kerap mendapati aspirasi yang berulang tiap adanya kegiatan reses. Hasil rapat paripurna yang ditindak lanjuti kepada pimpinan daerah melalui rapat kerja bersama pemerintah daerah dibahas bagaimana tindak lanjut serta realisasi aspirasi dari masyarakat

Kata Kunci: Optimasi; Reses; DPRD; COVID-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai perwujudan penyelenggaraan dari pemerintahan daerah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia yang disebutkan pada Undang-Undang no.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten atau kota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah.

Anggota DPRD memiliki keharusan sebagai wakil rakyat dalam menyerap, menghimpun, menampung dan memproses aspirasi masyarakat. Lebih lengkapnya kewajiban yang dimiliki antara lain adalah: (1) memiliki kemampuan dalam mendengarkan dan menyerap aspirasi dari konstituennya pada saat kunjungan kerja secara periodik. Maksud dari “kunjungan kerja secara periodik” ialah kegiatan wajib anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituen daerah pilihannya secara berkala pada kegiatan reses, yang mana hasilnya di laporkan secara tersurat kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota. Sebagai sikap akuntabilitas moral dan politis pada masa reses di setiap konstituennya. (2) Selanjutnya mewedahi serta memproses dari aspirasi dan laporan yang ada dan (3) sebagai tanggung jawab Anggota DPRD baik setiap tugas moral dan politik pada setiap daerah pemilihannya / konstituennya.

Pelaksanaan kegiatan reses yang dilakukan oleh komisi 3 keuangan dan pembangunan dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pelaksanaan Kegiatan Reses oleh Komisi III

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	RESES		Keterangan
		MELAKSANAKAN	TIDAK MELAKSANAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	10	10	0	Januari - April
	10	1	9	Mei - Agustus
	10	5	5	September - Desember
2021	10	8	2	Januari – April
	10	7	3	Mei – Agustus
	10	7	3	September - Desember

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Tanah Laut 2021(diolah oleh penulis)

Dapat dilihat dari tabel bahwa pelaksanaan kegiatan reses belum maksimal, ini membuktikan belum terlaksananya fungsi pengawasan oleh anggota DPRD kabupaten Tanah Laut. Selain itu juga karena mulai mewabahnya virus corona yang membuat terhambatnya pelaksanaan kegiatan reses. Hal ini harus diperhatikan mengingat kegiatan reses menjadi sarana publik dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam bukunya Widjaja (2005:37) berpendapat bahwa “Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penyelenggaraannya untuk mensejahterakan rakyat. Terutama pada pemerintahan daerah harus lebih mengutamakan prospek relasi antar rangkaian pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, kemampuan dan keberagaman daerah, kesempatan dan tantangan kompetisi global dengan memberikan otoritas yang sebanyak-banyaknya kepada daerah, bersamaan dengan pelimpahan wewenang melaksanakan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kurang optimalnya penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan kegiatan reses yang dinilai sebagian masyarakat hanya sebuah formalitas saja, hal ini akan memengaruhi kinerja lembaga DPRD. Dampak yang akan dirasakan cukup merugikan khususnya penetapan peraturan daerah yang dibuat tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan didalamnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Bidang Keuangan dan Pembangunan di masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Beragam permasalahan tentunya dialami oleh anggota DPRD di seluruh Indonesia dalam kegiatan reses hingga penetapan kebijakan. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang berada di level pemerintahan tentunya memiliki strategi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pandemi covid-19 berdampak langsung terhadap kegiatan reses terutama dalam penyerapan aspirasi masyarakat sehingga terjadi kurang optimalnya penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan kegiatan reses ini akan memengaruhi kinerja

lembaga DPRD. Hal ini mengalami dampak yang cukup merugikan khususnya penetapan peraturan daerah yang dibuat tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan didalamnya. Pada tujuannya kegiatan reses dilakukan guna membangun daerah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan pada bagian desa, namun pada pelaksanaannya kurang maksimal disebabkan faktor dari Anggota DPRD maupun faktor kondisi saat ini yang sedang dilanda virus corona sehingga membatasi manusia untuk melakukan kegiatan diluar rumah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama oleh Izza Zulhanda Fitri (2018) kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD di dapil III ada dua program yang pertama reses yang kedua jasmal sebagai bentuk komunikasi anggota dewan dengan masyarakat. Sebagai komunikasi politik yang dilakukan kepada konstituennya dalam konteks memaksimalkan kegiatan reses dalam lingkup dan cara masing-masing anggota DPRD. Penelitian kedua oleh Kurniasih, D., & Rusfiana, Y (2018) harapan-harapan yang muncul oleh masyarakat pada saat mengikuti kegiatan reses berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditampung dan dibuatkannya kebijakan. Reses yang bertujuan untuk menjangkau aspirasi masyarakat bukan hanya bersifat politis saja sebagaimana untuk mengartikulasikan masyarakat. Penelitian ketiga oleh Azzahri, R., Andri, S., & Adiarto (2021) penggunaan dana reses yang belum efektif menurut Makmur masih ada kriteria yang belum terpenuhi dan kurangnya pendidikan politik masyarakat menjadikan kegiatan reses hanya sekedar rutinitas bukan berdasarkan kebutuhan dan terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam merealisasikan hasil reses.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kontribusi masing-masing penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah dalam rangka sebagai bahan untuk menyusun *state of the art* yakni terkait dengan kumpulan teori, dan referensi baik yang mendukung atau tidak mendukung penelitian. Adapun beberapa penelitian yang dikumpulkan tersebut ditujukan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-masing jurnal dapat dijadikan acuan.

Dari beberapa jumlah penelitian yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas Optimalisasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Bidang Keuangan dan Pembangunan di masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong dilakukan oleh pench terdahulu.

1.5 Tujuan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis optimalisasi kegiatan reses anggota DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat di bidang keuangan dan pembangunan di masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui dan menganalisis Kendala yang di hadapi oleh anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di bidang keuangan dan pembangunan di masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Mengetahui dan menganalisis Upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam mengahadapi kendala terkait penyerapan aspirasi masyarakat di bidang keuangan dan

pembangunan di masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif. Data primer sebagai sumber data yang diperoleh penulis langsung pada lokasi penelitian melalui wawancara terhadap obyek penelitian dan observasi langsung di lapangan. Data sekunder berasal dari sumber yang telah diolah, sumber tersebut dapat berupa buku, dokumen-dokumen, laporan, sumber data kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

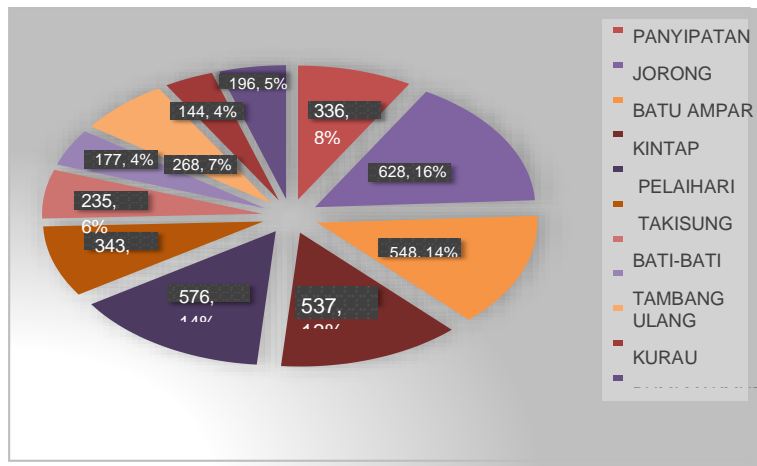
Lokasi penelitian ini berada di Pelaihari yang juga ibukota Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut terletak pada koordinat $114^{\circ}30'20$ Bujur Timur sampai dengan $115^{\circ}23'31$ Bujur Timur dan $3^{\circ}30'33$ Lintang Selatan sampai dengan $4^{\circ}11'38$ Lintang Selatan. Letak astronomis ini memberi karunia pada Tanah Laut berupa kekayaan alam yang meliputi keragaman flora dan fauna.

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas keseluruhannya $3.631,35 \text{ km}^2$ atau $9,71\%$ dari luas keseluruhan provinsi Kalimantan Selatan. Keadaan geografisnya berada pada dataran rendah, rawa-rawa, pantai, dataran tinggi dan gunung-gunung. Area ini memiliki batasan wilayah sebagai berikut. Di sebelah Utara, Tanah Laut berbatasan dengan Kota Banjarbaru. Batas ini sangat penting bagi Tanah Laut karena Banjarbaru merupakan daerah otonom yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemelukada.

Sementara itu di selatan Tanah Laut berbatasan dengan Laut Jawa yang merupakan perairan dangkal dengan luas kira-kira mencapai 310.000 km^2 . Laut Jawa yang dikenal pernah menjadi jalur perdagangan dunia pada abad k-17, dan pada masa itu banyak pedagang dari penjuru dunia yang datang guna mencari rempah-rempah.

Sementara itu di timur Tanah Laut berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu yang berpengaruh pada Tanah Laut karena tempat penghasil tambang terutama batu bara menjadikan Tanah Laut sebagai lintas wilayah antar Kabupaten untuk mendistribusikan hasil alam maupun alat-alat berat sebagai kebutuhan tambang.

Kabupaten Tanah Laut memiliki 11 kecamatan dengan wilayah terluas berada di kecamatan Jorong. Dengan persentase sebagai berikut :



Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni) sebesar 354.340 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,15 persen dari tahun 2020.

50% dari penduduk pekerja berjenis kelamin laki-laki di atas 15 tahun berada pada sector pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Dan yang berjenis kelamin perempuan berada pada sector yang sama dengan angka terbesar mencapai 41,04%.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Tanah Laut maka Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan misi-misi yang telah ditentukan. Jumlah anggota DPRD periode 2019-2024 di Tanah Laut adalah 35 orang terpilih melalui pemilihan umum.

3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Rangkaian pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dari penetapan jadwal kegiatan reses hingga rapat paripurna sebagai tempat menyampaikan aspirasi. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang telah ditampung oleh Anggota DPRD kemudian disaring kembali untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Kemudian hasil reses tersebut dibawa kembali sebagai pokok-pokok pikiran Anggota DPRD dalam perancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berikut ada hasil dari kegiatan reses berupa beberapa aspirasi dari masyarakat yang disampaikan pada kegiatan reses tahun 2021 oleh Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Beberapa keluhan masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD diantaranya adalah mengenai kalangkaan gas LPG 3 kg, perhatian untuk penambahan honor untuk guru pengajar TKA/TPA Al-Qur'an, Program PTSL untuk sertifikat tanah, dan masalah masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit.

Hasil Aspirasi Masyarakat dari Kegiatan reses tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut

Bidang	Aspirasi
Infrastruktur	perbaikan jalan yang ada di semua Dapil. Selain perbaikan jalan usulan lainnya berupa pembuatan jembatan, siring, normalisasi sungai, saluran air/selokan/gorong-gorong, box culvert, bronjong, permohonan sumur bor, dan penerangan

	<p>jalan. Adapun permohonan bantuan untuk rehab / bedah rumah warga miskin, rehab Puskesmas, penambahan ruang kelas sekolah, TPA dan PAUD, permohonan bantuan perbaikan masjid / musholam penghijauan untuk gunung Birah di Kecamatan Panyipatan, Pembangunan batas desa, bantuan alat Foting, pembuatan tempat pembuangan sampah, serta bantuan mesin genset dan perlengkapan rukun kematian</p>
<p>Pengembangan Usaha dan Sumber Daya Manusia</p>	<p>usulan tentang pengadaan bibit sapi, bibit itik, bibit padi IR, bibit pohon buah-buahan, permohonan bibit ulin, pohon kayu kapas, dan bibit durian untuk perkebunan, Pelatihan pra kerja, bantuan untuk kelompok PKK berupa peralatan masak, bantuan alat perontok padi dan handraktor, bantuan alat tangkap ikan bagi nelayan, serta bantuan rehabilitasi tambak ikan.</p>
<p>Pengembangan Kesenian, Keagamaan, dan Olahraga</p>	<p>usulan yaitu pengadaan alat musik untuk kesenian gamelan; bantuan untuk grup zumba berupa sound system dan seragam, pembangunan atau rehab gedung dan lapangan olahraga; bantuan perlengkapan seragam, sound system dan alat habsy; bantuan alat-alat olahraga; serta bantuan untuk Karang Taruna.</p>
<p>Pariwisata</p>	<p>Aspirasi masyarakat untuk membuka wisata baru yaitu wisata alam terbuka, dan wisata danau pemancingan di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan.</p>

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut 2021

Dalam menganalisis optimalisasi kegiatan reses dalam menyerap aspirasi masyarakat di bidang keuangan dan pembangunan di masa pandemi COVID-19, penulis menggunakan teori masa reses menurut Wasistiono, S dan Wiyoso (2009:197) yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil reses.

1. Persiapan, berdasarkan hasil observasi dokumen dan wawancara dari anggota DPRD terhadap pelaksanaan reses di Kabupaten Tanah Laut, sudah baik, dimana para anggota DPRD sudah memiliki jadwalnya untuk berkunjung ke daerah yang sudah ditentukan untuk melaksanakan kegiatan reses yang bertujuan menyerap aspirasi rakyat daerah pemilihan. Dalam melaksanakan reses setiap anggota DPRD didampingi oleh 1 atau 2 orang pendamping dari sekretariat DPRD dengan tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reses, tugas pendamping yaitu untuk Melakukan koordinasi dengan kecamatan, mencatat risalah atau dokumen pelaksanaan reses, mempersiapkan fasilitas. Fasilitas yang disediakan disesuaikan dengan kondisi saat pelaksanaan reses.
2. Pelaksanaan, berdasarkan pengamatan penulis secara observasi dan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat bahwa pada kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut masyarakat senang dengan adanya kegiatan tersebut namun dalam penyerapan aspirasi belum merata keseluruhan wilayah. Dalam pelaksanaan reses hanya dilakukan anggota DPRD pada daerah pemilihan yang menjadi lumbung suara anggota DPRD yang bersangkutan mengakibatkan kecenderungan pembangunan terhadap daerah

lainya. Pada pelaksanaan dirasa kurang maksimal karena tidak semua masyarakat dapat menghadiri acara kegiatan reses, sehingga penjangkaran aspirasi masyarakat belum optimal.

3. Pelaporan, berdasarkan hasil observasi lapangan melalui wawancara penulis dari pegawai Sekretaris Dewan, selama kegiatan reses semua aspirasi masyarakat dipertanggungjawabkan oleh anggota DPRD melalui laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan reses. Anggota DPRD sebagai perorangan diharuskan membuat laporan tertulis atas hasil tugasnya selama reses pada pelaksanaan kegiatan, dan kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Dalam pelaksanaan rapat tersebut, anggota DPRD diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan reses berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing yang berisikan beragam aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan Kabupaten Tanah Laut.
4. Tindak lanjut hasil reses, berdasarkan hasil wawancara dari tokoh masyarakat, hasil dari aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPRD kebanyakan sudah mendapat tanggapan dan tindakan yang benar melalui reses menjadi program pembangunan. Namun sayangnya masih banyak kekurangan di masyarakat seperti perbaikan jalan, pemasangan alat penerangan, dan perbaikan fasilitas umum belum sepenuhnya teratasi. Anggota DPRD dan pemerintah harusnya sadar dengan kebutuhan pokok masyarakat dengan pembangunan yang masih belum memadai.

Kendala yang dialami :

1. Pelaksanaan yang kurang optimal akibat pandemi menjadikan penjangkaran aspirasi belum berjalan maksimal. Selain itu kegiatan reses yang dilaksanakan hanya dilakukan di daerah pilihan anggota DPRD sehingga penyerapan aspirasi masyarakat belum dapat diserap secara menyeluruh.
2. Masyarakat memiliki aspirasi yang selalu disampaikan kepada anggota DPRD dalam kegiatan reses, hal ini berkaitan dengan anggaran yang terbatas dari pemerintah daerah. Anggaran yang terbatas membuat masyarakat selalu menyampaikan aspirasi yang sama setiap adanya kegiatan reses yang dihadiri oleh anggota DPRD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, kegiatan reses anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat di bidang keuangan dan pembangunan di masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut, pada pelaksanaannya sekretaris dewan sebagai pendamping dan memfasilitasi anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses. Pada tahap pelaksanaan masyarakat cukup senang dengan adanya reses namun di sisi lain pelaksanaan kegiatan reses hanya di daerah pilihan DPRD sehingga penyerapan aspirasi belum merata ke seluruh wilayah. Setiap kegiatan reses anggota DPRD wajib membuat laporan tertulis dan akan disampaikan pada rapat paripurna, anggota yang menerima aspirasi kerap mendapati aspirasi yang berulang tiap adanya kegiatan reses. Hasil rapat paripurna yang ditindak lanjuti kepada pimpinan daerah melalui rapat kerja bersama pemerintah daerah dibahas bagaimana tindak lanjut serta realisasi aspirasi dari masyarakat. .

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada anggota DPRD agar kedepannya dalam pelaksanaan reses dapat berjalan

optimal terutama dalam pembangunan di masa pandemic Covid-19.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama untuk Sekretariat Dewan Kabupaten Tanah Laut beserta jajaran pegawai dan tokoh masyarakat yang telah memberi kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Azzahri, R., Andri, S., & Adiarto. (2021). *Efektivitas penggunaan dana reses oleh anggota DPRD kota Pekanbaru dalam menyerap aspirasi masyarakat pada tahun 2021*.
- Fitri, Z. I. (2018). *Komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam kegiatan reses: studi kasus di Dapil III Kabupaten Jombang*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kurniasih, D. (2018). *MENGARTIKULASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT*. 4, 380–395.
- Wasistiono, S dan Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia.
- Widjaja, H. (2005). Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. In *Penerbit, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta*. PT. Raja grafindo persada.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

